

Perkembangan Anggaran Sektor Publik

Sistem anggaran sektor publik dlm perperkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multipungsi yg digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa jenis pendekatan utama yaitu anggaran tradisional & new public management.

• Anggaran Tradisional

=> Pendekatan yang banyak digunakan dinegara berkembang dewasa ini, terdapat 2 ciri yang didasarkan atas pendekatan impremental dan struktur susunan anggaran yang bersifat line item.

• Kelemahan anggaran Tradisional

1. Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
2. Lebih berorientasi pada input dari output.
3. Anggaran tradisional bersifat tahunan.
4. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin & pengeluaran modal

• Anggaran Publik dengan pendekatan NPM

Era ini per berfokus pada kinerja organisasi, bukan pada kebijakan :

- 1 Pemerintah katalis
- 2 Pemerintah milik masyarakat
- 3 Pemerintah yang kompetitif
- 4 Pemerintah yang digerakan oleh misi
- 5 Pemerintah yang berorientasi pada hasil

• Perubahan Pendekatan Anggaran

pendekatan baru dalam sistem anggaran kinerja (performance budgeting), Zero-based budgeting, planning, programming & budgeting system (PPBS), Anggaran tersebut memiliki karakteristik umum sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 komparatif 2 Terintegrasi 3 Proses pengambilan keputusan yg rasional 4 berjangka panjang 5. Spesifik. kryan | <ol style="list-style-type: none"> 6 Analisis total cost 7 berorientasi input, output, & outcome 8. Adanya pengawasan kinerja |
|---|--|

• Anggaran kinerja

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep Value for Money dan pengawasan atas kinerja output.

Anggaran kinerja didasari pada tujuan & sasaran kinerja

• Zero - Based Budgeting

Penyusunan anggaran ini dapat menghilangkan incremental dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari @ nol. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini.

• Proses implementasi ZBB

ada 3 tahap :

1. Identifikasi unit-unit keputusan : struktur organisasi pada dasarnya di terdori atas setiap pusat pertanggung jawaban merupakan unit pembelan keputusan (decision unit)
2. Penentuan paket - paket keputusan : gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual
3. memeringkat & mengevaluasi paket keputusan

• Keuntungan ZBB

- dapat menghasudkan alokasi sumber daya secara efisien
- berfokus pada value for money
- memudahkan untuk mengidentifikasi inefisiensi & tidak efektif
- meningkatkan pengetahuan & motivasi staf manager
- merupakan cara yang sistematis untuk menggeser status quo

• Kelemahan ZBB

1. Memakan waktu
2. menekankan jangka panjang
3. membutuhkan teknologi yg maju
4. Implementasi ZBB menimbulkan masalah politik didalam organisasi

• Planning, programming & budgeting sistem (PPBS)

• Proses implementasi PPBS

- Menentukan tujuan umum organisasi & tujuan unit organisasi dengan jelas.
- Pemilihan program yg memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil
- Alokasi sumber daya ke masing-masing program yg disetujui

• Karakteristik PPBS

- Berfokus pada tujuan & aktivitas untuk mencapai tujuan
- Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi
- Dilakukan analisis secara sistematis atas berbagai alternatif program.

• Kelebihan PPBS

- Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja
- Memudahkan dalam pendelegasian
- memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya.
- Menghilangkan program yang overlapping
- PPBS menggunakan teori marginal utility

• Kelemahan PPBS

- membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran & staf yang memiliki kapabilitas tinggi
- PPBS bagus secara teori tetapi sulit diimplementasi
- mengabaikan realitas politik
- merupakan teknik anggaran yg statistically oriented.

* Masalah Utama Penggunaan ZBB dan PPBS

1. keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas.
2. kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk output.
3. masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan dimasa depan, perubahan politik & ekonomi.

4. pelaksanaan teknik menimbulkan beban pekerjaan yg sangat berat
5. kesulitan dalam menentukan tujuan & pemrograman
6. Sering kali tidak memungkinkan melakukan perubahan cepat
7. Terdapat Hambatan birokrasi & perlawanan politik yg besar.
8. Pemerintahan beroperasi dlm dunia yg tidak rasional.

* Pengelolaan keuangan Negara & Daerah di Indonesia

=> Keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, set hingga pengawasan terhadap hak dan kewajiban negara / Daerah yang bernilai uang.

diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 12 Tahun 2019. Prinsip utamanya adalah tertib, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab dengan APBN / APBD sebagai instrumen utama

berikut adalah poin-poin penting materi pengelolaan keuangan negara & daerah :

- 1 Dasar Hukum Utama
- 2 Ruang lingkup dan pengelola
- 3 Siklus pengelolaan keuangan
- 4 Sumber Pendapatan
- 5 Asas pengelolaan keuangan Daerah